

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Nagari Koto Tuo, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat pada Nagari Koto Tuo pada Tahun 2015 belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengembangan Dana Desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat belum terlaksana secara langsung karena belum adanya pengalokasian dana yang menghasilkan peningkatan ekonomi tersebut, seperti pembangunan BUMNag. Namun dampak positif dari pembangunan jalan di setiap Jorong tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian rakyat karena struktur daerah Nagari Koto Tuo yang sebagian besarnya adalah area persawahan, maka jalan tersebut mempermudah masyarakat untuk melakukan perjalanan dalam pengiriman hasil panen dan kegiatan usaha lainnya yang terdapat pada daerah terpencil, karena jalan yang dibuat berada pada daerah yang membutuhkan akses ke jalan pemukiman maupun jalan usaha tani. Prioritas pengelolaan dan dampak terhadap perekonomian masyarakat Nagari Koto Tuo masih dijumpai beberapa kendala.
2. Kendala Hukum yang ditemukan adalah tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan

penetapan prioritas penggunaan dana desa, sehingga Dana Desa Tersebut bisa saja digunakan untuk kegiatan lain diluar Prioritas yang telah ditentukan. Sedangkan kendala lainnya hanyalah beberapa teknis seperti terlambatnya penyaluran dana desa di Nagari Koto Tuo yang menyebabkan terlambat pua waktu perealisasiian Dana Desa tersebut dan menyebabkan minimnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari Koto Tuo, kurangnya pemahaman dalam hal penyaluran Dana Desa yang menitikberatkan pada pembangunan fisik saja tanpa ada pembangunan yang menghasilkan uang untuk Nagari untuk jangka panjang. Sedangkan permasalahan prinsipalnya adalah minimnya pengetahuan dan pelatihan mengenai Pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan terjadinya kebingungan oleh aparatur nagari dalam hal pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

Kritik dan saran penulis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Koto Tuo adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Tuo dapat direncanakan lebih baik dan tidak menggunakan dana tersebut pada satu jenis kegiatan saja dan pejabat Nagari Koto Tuo dapat lebih memikirkan dan memprioritaskan penggunaan Dana Desa yang bertujuan untuk jangka panjang seperti pembangunan Badan Usaha Milik Nagari guna meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Koto Tuo dan dapat menambah

pendapatan Nagari agar Nagari Koto Tuo dapat maju dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Nagari Koto Tuo dan penulis sendiri dan menjadikan masyarakat Nagari menjadi sejahtera. Karena sejatinya suatu daerah dapat dikatakan sejahtera apabila masyarakatnya telah makmur, sesuai dengan pasal 23 (1) UUD 1945 bahwa pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah Pusat seharusnya merevisi kembali peraturan yang telah ada, berkaitan dengan sanksi mengenai penggunaan Dana Desa diluar dari Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lebih memperhatikan kesiapan pejabat Nagari yang melakukan pengelolaan Dana Desa agar pengelolaan Dana Desa di tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala mendasar yang terdapat pada Sumber Daya Manusia seperti yang terjadi pada Nagari Koto Tuo. Seperti memberikan lebih banyak pelatihan mengenai Pengelolaan Dana Desa kepada seluruh perangkat Nagari yang akan melaksanakan pengelolaan dana desa tersebut.